

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Menjamurnya jumlah supermarket hingga ke kota-kota kecil dan adanya strategi pemangkasan harga atau *discount* memungkinkan konsumen kelas menengah ke bawah untuk mengakses supermarket. Secara teori, persaingan yang terjadi diantara pasar modern tersebut dapat memberikan keuntungan kepada konsumen, namun hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu kegiatan operasional di pasar-pasar tradisional. Beberapa kriteria yang menjadi faktor pembeda antara pasar modern dan pasar tradisional dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Perbandingan Kriteria Pasar Modern dan Pasar Tradisional Sleman

No	Karakteristik	Pasar Modern	Pasar Tradisional
1	Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Oleh perusahaan atau grup ➢ Dikelola secara profesional 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Dikelola oleh pemerintah kota (Dinas/PD Pasar) ➢ Terdiri dari unit-unit usaha kecil yang dimiliki perseorangan bersifat tradisional.
2	Organisasi	Ada manajemen pengelolaan yang jelas.	Ada koperasi pedagang pasar
3	Kondisi fisik	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penuh fasilitas yang baik ➢ Bersih dan nyaman ➢ Keteraturan yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Bangunan temporer, semi-permanent atau permanent ➢ Kebersihan tidak terjaga dengan baik ➢ Gang antar kios terlalu sempit ➢ Fasilitas parkir tidak memadai
4	Produk	➢ Kualitas produk lebih	➢ Barang yang dijual

No	Karakteristik	Pasar Modern	Pasar Tradisional
		<p>baik</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Produk yang dijual merupakan produk kebutuhan rumah tangga sehari-hari ➤ Mutu barang terjamin ➤ Barang ditata berdasarkan jenisnya ➤ Barang dapat dipilih sendiri oleh konsumen 	<p>adalah barang - barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Umumnya barang yang dijual lebih segar dan bervariasi ➤ Harga relative lebih murah, dapat ditawar ➤ Penataan barang seadanya
5	Hubungan penjual dan pembeli	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Interaksi antara penjual dan pembeli terbatas ➤ Transaksi bersifat ekonomis dan efisien 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat interaksi antara penjual dan pembeli ➤ Terjadi proses tawar-menawar
6	Waktu kegiatan	Dimulai rata-rata dari pukul 09.00 s.d. 22.00 WIB	Pada umumnya dimulai dari pukul 06.00 s.d 18.00 WIB
7	Mekanisme perolehan komoditas	Produk berasal langsung dari produsen	Diperoleh melalui pasar induk
8	Lokasi	Memiliki lokasi yang strategis	Berada dilokasi-lokasi yang tidak terencana dengan baik namun mudah terjangkau.

Sumber: Oktavia (2007)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryadarma, Poesoro, Budiwati, Akhmadi, & Rosfadhila (2007) bahwa kelesuan yang terjadi di pasar tradisional kebanyakan bersumber dari masalah internal pasar tradisional yang memberikan keuntungan pada supermarket. Karena itu, untuk menjamin keberlangsungan pasar tradisional diperlukan perbaikan sistem pengelolaan pasar tradisional yang memungkinkannya dapat bersaing dan tetap bertahan bersama kehadiran supermarket.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Sahban dan Periwa (2018) menjelaskan bahwa pedagang di pasar tradisional yang menjadi

saluran distribusi utama produk pertanian rakyat Indonesia, saat ini belum mampu bersaing dengan para pedagang di pasar modern. Padahal tidak sedikit orang yang mengandalkan hidupnya pada pedagang di pasar tradisional. Ketika dilanda krisis ekonomi, pedagang di pasar tradisional mampu mendukung kehidupan sebagian besar orang Indonesia, baik pedagang maupun petani yang hanya mampu memasarkan produk pertanian mereka melalui pasar ini. Dengan kehadiran pedagang yang cepat di pasar tradisional berdampak pada pemasok lokal yang umumnya tidak dapat pergi ke pengecer besar

Hasil penelitian tersebut menandakan bahwa perlu adanya strategi dan program khusus dari pemerintah untuk melakukan pemberdayaan terhadap pasar tradisional guna meningkatkan tingkat kesejahteraan pedagang pasar tradisional, menjaga omzet dan keuntungan pedagang pasar tradisional yang pada umumnya berasal dari masyarakat menengah ke bawah.

Sleman merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki sekitar 41 pasar tradisional yang tersebar di 17 kecamatan. Data mengenai perbandingan jumlah pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Sleman tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Kabupaten Sleman

Jenis Pasar	2017	2018
Pasar Tradisional	41	41
Minimarket	340	387
Super/Hypermarket	20	22
Pusat Perbelanjaan/Mall	3	4

Sumber: (BPS, 2019)

Banyaknya jumlah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman dapat dijadikan objek penelitian ini. Selain itu, pasar tradisional di Kabupaten Sleman juga mengalami permasalahan ditinggalkan oleh para konsumen. Berdasarkan reportase yang dilakukan oleh republika.co.id, menyimpulkan bahwa pada awal tahun 2018, terdapat delapan dari 41 pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sleman yang ditinggalkan pembeli (www.republika.co.id).

Merespons keadaan tersebut pemerintah kabupaten Sleman berusaha melindungi pedagang pasar tradisional dengan mengeluarkan berbagai syarat berdirinya usaha pasar modern yang diatur dalam Perda Kabupaten Sleman No. 18 Tahun 2012 pada pasal 12 yaitu harus memperhatikan aspek lokasi usaha yang meliputi rencana tata ruang dan status jalan, rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani, jarak dengan pasar tradisional, aspek sosial, aspek kemitraan dengan UMKM serta aspek penggunaan tenaga kerja lokal.

Peran aktif pemerintah dalam memproteksi dan memberdayakan kegiatan ekonomi masyarakat diharapkan mampu membantu mengatasi berbagai masalah yang ada, namun tidak jarang program pemberdayaan dari pemerintah tidak berjalan sesuai rencana dan tidak efektif pada saat diterapkan. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mencoba merumuskan model pemberdayaan pasar tradisional. Pada penelitian Tanuwidjaja dan Wirawan, (2012) menjelaskan bahwa 13.450 Pasar Tradisional di Indonesia menghadapi persaingan hebat dari para pendatang dari pasar modern. Tanuwidjaja dan Wirawan, (2012) menjelaskan bahwa pasar tradisional gagal bersaing karena

perencanaan yang buruk, akses yang tidak nyaman, aktivitas perdagangan yang penuh sesak, kurangnya sirkulasi udara dan sanitasi yang buruk, mempengaruhi 12.625 juta vendor. Model pengembangan yang lebih berkelanjutan untuk pasar tradisional Indonesia diusulkan agar sesuai dengan model *Singapore's sustainable commercial*.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang efektifitas kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan pasar tradisional Tahun 2018 di Kabupaten Sleman. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini berjudul **“Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman, Dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional, Tahun 2018”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah efektifitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pemberdayaan pasar tradisional tahun 2018?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Sleman tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui efektifitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pemberdayaan pasar tradisional tahun 2018.
2. Mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Sleman tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai efektifitas kebijakan peran Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pemberdayaan pasar tradisional tahun 2018 yang berguna untuk mengetahui kesesuaian antara hasil yang diperoleh dari program dengan perencanaan yang dilakukan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara mendalam kepada pembaca tentang efektifitas kebijakan peran Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pemberdayaan pasar tradisional tahun 2018 dan bisa sebagai bahan rujukan untuk kabupaten lain dalam mensukseskan upaya pemberdayaan pasar tradisional.

E. Studi Terdahulu

Berikut beberapa penelitian yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini yaitu: pertama penelitian Rompas, Gosal, & Undap (2018) tentang efektifitas pengelolaan Pasar Tradisional Kawangkoan dalam menunjang pendapatan asli daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa usaha revitalisasi yang dilakukan pada Pasar Tradisional Kawangkoan, dapat berjalan dengan efektif sebab hal tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian Wuryandani & Meilani (2013) mengenai peran kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pengembangan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Yogyakarta memiliki potensi yang baik dalam hal perdagangan sebab memiliki letak yang strategis dan jumlah penduduk yang lumayan tinggi. Selain itu, Yogyakarta merupakan salah satu pusat perkembangan industri kreatif di Indonesia. Namun, disadari bahwa berbagai potensi tersebut masih membutuhkan banyak perhatian dari pemerintah agar usaha mikro, kecil, dan menengah dapat berkembang dengan baik.

Penelitian Adeliana, Ridlo, & Rochani (2019) tentang evaluasi manajemen yang dilakukan terhadap pasar tradisional. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif berbentuk pendekatan rasionalistik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada Pasar Tradisional Peterongan, kondisi manajemennya dapat dikategorikan tidak layak yang perlu mendapatkan evaluasi lebih lanjut. Kendala-kendala yang dihadapi pasar tradisional tersebut yaitu permasalahan anggaran, perawatan fasilitas, dan tidak adanya kontrol dari pemerintah.

Penelitian Ayuningsasi & Paramita (2013) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektifitas program revitalisasi pasar yang dilakukan terhadap pasar tradisional Agung Peninjoan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel yang berjumlah 78

pedagang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya revitalisasi pasar tradisional Agung Peninjoan dapat dikategorikan efektif dengan tingkat keefektifan mencapai 71,79 persen. Dampak revitalisasi pasar tradisional Agung Peninjoan dapat terlihat dari fasilitas yang ada, manajemen tata kelola yang baik, dan adanya peningkatan pendapatan yang dimiliki oleh para pedagang di pasar tradisional Agung Peninjoan.

Penelitian Martin (2017) yang mengkaji tentang penerapan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung yaitu kebijakan zonasi pasar modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan zonasi dilakukan untuk melindungi fungsi pasar tradisional dari gempuran pasar-pasar modern di Kota Bandung.

Penelitian Sucipto (2017) tentang pengaturan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat menurut hukum positif Indonesia. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini menyimpulkan bahwa dalam rangka menjaga ketertiban dan persaingan yang sehat diantara pasar modern dan pasar tradisional, pemerintah perlu melakukan pengawasan usaha yang menyeluruh terhadap pasar-pasar yang ada guna tercapai kondisi persaingan usaha yang sehat dan taat terhadap aturan yang berlaku.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Efektifitas Kebijakan

Efektifitas dapat disimpulkan sebagai tingkat tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau program tertentu.

Kebijakan, tujuan dan sasaran tersebut dapat dikategorikan sebagai efektif jika dapat memberikan dampak terhadap tercapainya tujuan tersebut. Menurut H. Emerson (dalam Soewarno, 1996), efektifitas merupakan tercapainya tujuan dari kebijakan atau program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan Georgopolous (1985), mengemukakan:

“Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.”

Selanjutnya Steers (2012) mengemukakan bahwa:

“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Lebih lanjut menurut Kurniawan (2005) dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:

“Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan tingkat ukuran bagaimana tujuan atau target dapat terpenuhi. Hal ini dapat kita ketahui dengan membandingkan hasil yang kita capai dengan tujuan yang hendak diraih.

Menurut Siagian (2006), efektivitas suatu kebijakan dapat dilihat dari beberapa kriteria berikut:

- a. Kejelasan tujuan.
- b. Strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan.
- c. Terdapat sinkronisasi antara tujuan dengan strategi pencapaian tujuan
- d. Matangnya perencanaan.
- e. Program yang tersusun dengan baik
- f. Terdapat sarana dan prasarana yang memadai.
- g. Kualitas tingkat pelaksanaan.
- h. Sistem evaluasi dan pengawasan.

Selanjutnya menurut Lubis & Huseini (1987), terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam menganalisis tingkat efektifitas suatu organisasi, yaitu:

- a. *Resource approach*, yaitu pendekatan yang mengutamakan kualitas input yang ada pada organisasi.
- b. *Process approach*, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan pada strategi yang dimiliki organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.
- c. *Goals approach*, yaitu suatu pendekatan yang lebih mengutamakan bagaimana tingkat hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan.

Selanjutnya, menurut Duncan (dalam Steers, 2012) ukuran efektifitas dalam dilihat pada beberapa kriteria berikut:

- a. Pencapaian Tujuan

Suatu kebijakan dapat dikategorikan efektif jika hasil-hasil yang diperoleh sejalan dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pencapaian tujuan tersebut dilakukan agar kebijakan yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang maksimal terhadap sasaran kebijakan.

b. Integrasi

Integrasi dapat disimpulkan sebagai bagaimana kemampuan organisasi dalam menjalankan kebijakan yang diawali dengan proses sosialisasi agar terjalin komunikasi antar pihak-pihak yang terkait.

c. Adaptasi

Adaptasi dalam analisis kebijakan diukur dengan menggunakan aspek peningkatan kemampuan dan penyesuaian kualitas sarana dan prasarana pasar setelah dilakukannya proses pemberdayaan

2. Kebijakan Publik

Dalam rangka untuk mencapai tujuan utama, kebijakan publik diciptakan agar setiap anggota masyarakat mampu berjalan dengan satu tujuan bersama. Kebijakan publik tersebut dilakukan pemerintah dengan cara menjalankan suatu program yang berdampak kepada kehidupan masyarakat banyak. Islamy (2003: 20) menyatakan bahwa kebijakan publik didasarkan pada kepentingan seluruh masyarakat. Oleh karena itu Islamy (2003: 20) menambahkan bahwa pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan publik yang bersifat menjalankan suatu hal atau bisa juga melarang melakukan hal tersebut.

Selanjutnya Islamy (2003: 20) menjelaskan beberapa elemen yang harus ada pada kebijakan publik:

- a. Berbentuk tindakan yang ditetapkan pemerintah
- b. Berbentuk kebijakan yang nyata
- c. Berlandaskan pada tujuan yang telah direncanakan
- d. Berlandaskan pada kepentingan masyarakat umum

Selanjutnya menurut James Anderson (dalam Nugroho, 2014: 125) kebijakan publik itu adalah “*a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”. Artinya kebijakan publik dilaksanakan oleh suatu organisasi dengan tujuan untuk mengatasi persoalan yang muncul.

Carl I. Friedrich (dalam Nugroho, 2014: 126) memberikan definisi kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh organisasi ataupun individu untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam rangka menjalankan tujuan bersama. Artinya, dalam upaya meraih tujuan bersama, terkadang terdapat hambatan yang mengganggu, oleh karena itu, diperlukan adanya jalan keluar agar setiap potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan maksimal agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan efektif.

Secara umum, terdapat empat jenis kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan Formal, merupakan kebijakan yang disahkan secara tertulis dan dapat berlaku.
- b. Kebiasaan umum/ketetapan dari organisasi yang dapat diterima seperti SOP dll.
- c. Pernyataan pejabat publik dalam forum publik. Pernyataan tersebut dapat dianggap sebagai sikap yang diambil oleh lembaga tertentu dengan syarat pernyataan tersebut konsisten dan terencana.
- d. Perilaku pejabat publik juga dapat dianggap sebagai sikap yang sikap yang diambil oleh lembaga tertentu tersebut.

Dalam upaya menciptakan kebijakan publik, perlu dilakukan pengkajian terhadap seluruh aspek yang terkait. Tahap-tahap yang ada perlu mendapatkan kajian yang serius dari semua pihak. Menurut Siagian (2006: 77), terdapat tujuh kriteria kebijakan publik, sebagai berikut:

- a. Memiliki tujuan yang jelas agar kebijakan yang diambil dapat terarah dengan baik.
- b. Memiliki strategi yang jelas agar tujuan yang telah dipersiapkan dapat tercapai.
- c. Analisis yang lengkap agar tujuan dan strategi dapat berjalan dengan sinergis.
- d. Perencanaan yang matang dan terstruktur.
- e. Tahapan penyusunan program yang jelas.
- f. Terdapat fasilitas yang memadai.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.

h. Terdapat pengawasan dan evaluasi.

Selanjutnya, menurut Suharno (2010: 52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama dalam organisasi terkadang dapat menjadi landasan bagi pemangku kebijakan untuk mengeluarkan kebijakan publik. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat berupa tahapan birokrasi, pengambilan kebijakan lama dan langkah-langkah administrasi tertentu.

c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga terkadang banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadi dari pembuat kebijakan tersebut. Sifat-sifat inilah yang dapat mempengaruhi arah kebijakan dari sebuah lembaga.

3. Pemberdayaan

Pada dasarnya, ide pemberdayaan adalah cara yang dilakukan agar orang lain mampu melakukan berbagai hal yang kita inginkan, meskipun hal tersebut bukanlah menjadi keinginannya (Suharto, 2005: 57). Aziz dkk (2006: 169) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah konsep

dengan fokus utama yaitu kekuasaan. Oleh karena itu, pemberdayaan lebih mementingkan adanya pengakuan dari subjek terhadap hal-hal yang dimiliki oleh objek.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat merupakan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk bertahan dari segala hal yang muncul yang dapat merusak tatanan kehidupan. Wrihatnolo (2007: 75) menambahkan bahwa keberdayaan masyarakat dapat menjadi dasar adanya ketahanan secara nasional sebab masyarakat dapat mengembangkan dirinya untuk mencapai kemajuan.

Usman (dalam Huraerah, 2008: 87) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses yang dilakukan agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemandirian tertentu agar dapat bertahan dari berbagai masalah. Pada proses pemberdayaan ini, masyarakat perlu mendapatkan dukungan dan pendampingan agar masyarakat mampu memperlihatkan kemampuan yang dimiliki.

Menurut Ife (dalam Suharto, 2005: 59) berasal dari dua ide utama yaitu kekuasaan dan adanya kelompok lemah. Arti kekuasaan tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Kemampuan individu terkait dengan pilihan-pilihan hidup seperti tempat tinggal dan pekerjaan.
- b. Kemampuan untuk mendefinisikan kebutuhan dan keinginan
- c. Kemampuan untuk mengutarakan ide dan gagasan secara merdeka.

- d. Lembaga yang mampu mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat pada aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial.
- e. Kemampuan untuk memobilisasi masyarakat.
- f. Kemampuan untuk berdaya dalam aspek ekonomi.
- g. Kemampuan untuk bereproduksi seperti kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Hogan yang dikutip oleh Adi (2008: 85) menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri atas 5 tahapan utama:

- a. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experiences*);
- b. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan ketidakberdayaan.
- c. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*Identify one problem or project*).
- d. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identify useful power bases*),
- e. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*).

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses yang dilakukan untuk merubah kondisi masyarakat yang terbengkal oleh masalah menjadi

masyarakat yang kuat, mandiri, serta mampu keluar dari belenggu masalah yang ada.

4. Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan sebuah lokasi tempat berlangsungnya transaksi jual beli yang dapat diawali dengan proses tawar-menawar. Pasar tradisional menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan, pasar tradisional menjadi tempat bagi masyarakat golongan bawah untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tidak sedikit dari masyarakat miskin mencoba berdagang di pasar-pasar tradisional di tengah kondisi Indonesia yang penuh dengan pengangguran (Masitoh, 2013).

Menurut Harsasto & Astuti (2013) pasar tradisional merupakan tempat berlangsungnya transaksi jual beli dengan beberapa ciri tertentu seperti kios yang terbuka, cenderung memperjual belikan produk-produk lokal, dan memiliki kecenderungan stock produk yang sedikit sebab modal yang dimiliki oleh para pedagang di pasar tradisional terbatas.

Selain itu, pasar tradisional tidak memiliki label harga yang pasti sebab masing-masing pedagang memiliki tingkat keuntungan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar tradisional sering berubah-ubah sehingga dapat sangat merepotkan jika terdapat label harga (Dewi & Winarni, 2014).

Berikut beberapa kriteria yang dimiliki oleh pasar tradisional:

Tabel 1.3 Kriteria Pasar Tradisional

No	Karakteristik	Pasar Tradisional
1	Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none">➤ Dikelola oleh pemerintah kota (Dinas/PD Pasar)➤ Terdiri dari unit-unit usaha kecil yang dimiliki perseorangan bersifat tradisional.
2	Organisasi	Ada koperasi pedagang pasar

No	Karakteristik	Pasar Tradisional
3	Kondisi fisik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bangunan temporer, semi-permanent atau permanent ➤ Kebersihan tidak terjaga dengan baik ➤ Gang antar kios terlalu sempit ➤ Fasilitas parkir tidak memadai
4	Produk	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Barang yang dijual adalah barang - barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari ➤ Umumnya barang yang dijual lebih segar dan bervariasi ➤ Harga relative lebih murah, dapat ditawar ➤ Penataan barang seadanya
5	Hubungan penjual dan pembeli	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat interaksi antara penjual dan pembeli ➤ Terjadi proses tawar-menawar
6	Waktu kegiatan	Pada umumnya dimulai dari pukul 06.00 s.d 18.00 WIB
7	Mekanisme perolehan komoditas	Diperoleh melalui pasar induk
8	Lokasi	Berada dilokasi-lokasi yang tidak terencana dengan baik namun mudah terjangkau.

Sumber: Oktavia (2007)

Pasar tradisoonal dianggap sebagai roda utama penggerakan perekonomian dimasyarakat terutama masyarakat golongan bawah. Namun, saat ini pasar tradisional mendapatkan ancaman dari munculnya pasar-pasar modern dengan tingkat modal yang lebih tinggi. Hal inilah yang menjadi faktor tidak seimbangya persaingan usaha antar pasar tradisional dan pasar modern (Masitoh, 2013).

Namun pasar tradisional juga memiliki kelebihan-kelebihan tertentu seperti berikut:

- a. Dapat melakukan tawar menawar harga dengan bebas.
- b. Harga yang tertera cukup terjangkau.
- c. Menjadi salah satu lokasi utama munculnya interaksi sosial (Masitoh, 2013).

G. Definisi Konsepsional

1. Efektifitas kebijakan adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.
2. Kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh organisasi ataupun individu untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam rangka menjalankan tujuan bersama.
3. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.
4. Pasar tradisional adalah sebuah tempat yang terbuka dimana terjadi proses transaksi jual beli yang dimungkinkan proses tawar-menawar.

H. Definisi Operasional

1. Efektifitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pemberdayaan pasar tradisional tahun 2018 diukur dengan menggunakan 3 kriteria menurut Steers (2012), yaitu:

Tabel 1.4 Parameter Kebijakan Pemerintah

No	Indikator	Parameter
1	Pencapaian Tujuan	<ul style="list-style-type: none">▪ Tujuan yang jelas▪ Kemampuan mencapai tujuan
2	Integrasi	<ul style="list-style-type: none">▪ Prosedur▪ Proses sosialisai
3	Adaptasi	<ul style="list-style-type: none">▪ Peningkatan kemampuan▪ Sarana dan prasarana

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Sleman tahun 2018 diukur dengan tiga faktor menurut (Suharno, 2010: 52-53) yaitu:

Tabel 1.5 Parameter Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah

No	Indikator	Parameter
1	Tekanan dari luar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tuntutan pihak eksternal ▪ Tekanan lingkungan sosial
2	Pengaruh kebiasaan lama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengikuti kebijakan lama ▪ Proses birokrasi yang lama
3	Pengaruh sifat-sifat pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepentingan pribadi ▪ Dorongan untuk mencari keuntungan

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian adalah sesuatu proses seseorang dalam memahami fenomenal tertentu kemudian dikembangkan menjadi ide, teori, dan konsep. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dengan latar alami dengan memanfaatkan penelitian sebagai instrumen kunci. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif, penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.

3. Unit analisis

Unit analisis data adalah satuan yang diteliti berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2005: 75). Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.

4. Jenis Data

a. Data primer

Data primer (*Primary Data*) adalah suatu objek atau dokumen original material menatah dari pelaku yang disebut “*first-hand information*”. Data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi dinamakan data primer. Sumber data yang di peroleh secara langsung sebagai hasil pengumpulan peneliti sendiri yang berupa kata atau frase yang di peroleh melalui pengamatan dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada sumber yang telah ditetapkan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, pedagang, dan pengunjung pasar. Informasi mengenai sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6 Responden Penelitian

No	Narasumber	Instansi	Jumlah
1	Kepala Dinas	Disperindag	1
2	Pedagang	Pedagang Pasar	2
3	Tokoh Masyarakat	Pengunjung Pasar	2

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan atau dari data yang di kumpulkan dari tangan kedua (*Second-Hand Information*). Data yang di kumpulkan dari komentar, interpretasi atau pembahasan tentang original atau melalui sumber-sumber lain yang tersedia di sebut data sekunder. Sumber data yang di peroleh dari berbagai macam sumber lainnya dan bacaan. Data sekunder juga dapat berupa buletin, publikasi majalah, lampiran-lampiran dari berbagai organisasi, dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi tesis, skripsi, dan hasil survey, dan lain sebagainya yang dapat memperkuat temuan dan melengkapi informasi yang ada melalui pengamatan dan wawancara langsung. Data sekunder dalam dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman yang didapat oleh peneliti melalui internet maupun secara langsung, buku-buku, makalah, jurnal dan arsip yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mendapatkan keterangan informasi secara lisan dari sasaran penelitian atau dengan bercakap-cakap berhadapan muka langsung dengan orang yang bersangkutan. Wawancara dilakukan kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Moleong, (2011: 186) berpendapat bahwa wawancara adalah percakapan

dengan maksud tertentu percakapan ini dilakukan dua belah pihak yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dengan narasumber yang memberi jawaban itu.

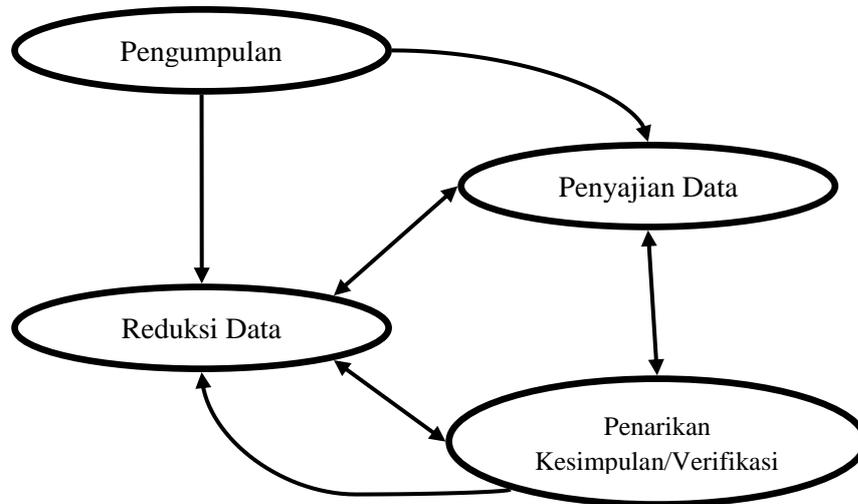
b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian pustaka bisa berupa buku, arsip, artikel yang digunakan sebagai bahan penunjang dari hasil wawancara. Menurut Sugiyono (2011: 250) dokumen adalah catatan peristiwa yang telah dilakukan yang berupa gambar, tulisan, atau karya monumental dari seseorang.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2011: 334) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Salah satu teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah Analisis Interaktif Miles dan Huberman (dalam Idrus, 2009: 148). Model analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Idrus (2009: 148)

Gambar 1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

Berikut penjelasan masing-masing proses dalam analisis data model interaktif.

a. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data diawali dengan mempersiapkan panduan wawancara yang didesain sedemikian rupa agar mampu menjawab pertanyaan penelitian. Pada tahap ini, peneliti harus memperhatikan aspek-aspek makro terlebih dahulu lalu beranjak pada aspek mikro. Peneliti juga harus mampu bersifat objektif dalam menggambarkan hasil yang diperoleh di lapangan.

b. Tahap Reduksi Data

Tahap ini dilakukan dengan adanya pemilihan dan penyederhanaan dari informasi yang diperoleh di lapangan. Tahap reduksi data dilakukan

disepanjang penelitian sedanga berlangsung agar peneliti dapat mengelompokkan data sesuai dengan topik penelitian.

c. *Display Data*

Tahap ini merupakan tahap penyajian data yang diperoleh di lapangan setelah dilakukan tahap reduksi data. *Display data* dilakukan agar peneliti dapat dengan mudah dalam mengambil kesimpulan hasil penelitian.

d. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahanan terakhir yang dilakukan dalam analisis kualitatif. Tahapan ini berarti peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan sebelumnya.